BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya pemerintah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dikenal dengan istilah pembangunan. Pembangunan adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan dianggap sebagai sebuah proses dimana unsur-unsur pendorongnya berinteraksi dan berkorelasi satu sama lain untuk menentukan rangkaian peristiwa peningkatan kesejahteraan masyarakat dari satu tahap perkembangan ke tahap berikutnya. Diperlukan identifikasi dan analisis yang cermat untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan daerah adalah upaya untuk menyesuaikan penggunaan sumber daya, meningkatkan keselaran antar kawasan, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan, dan membuat sektor pembangunan sesuai dengan proses penataan ruang (Muhamad dan Rahmi, 2023).

Pembangunan merupakan fase perubahan yang menghasilkan perbaikan. Tahap ini ditentukan oleh lembaga-lembaga nasional, status sosial, sifat-sifat masyarakat, keinginan untuk kemajuan ekonomi, dan inisiatif pengentasan kemiskinan. Pembangunan pada dasarnya adalah istilah yang dapat digunakan untuk mencirikan keseluruhan perubahan dan kemampuan beradaptasi sistem sosial. Hal ini dapat dicapai dengan mempertimbangkan bagaimana masyarakat dan kelompok sosial dapat berbagi kebutuhan dan keinginan dasar mereka untuk meningkatkan kualitas hidup material dan spiritual (Fransimeon, 2023).

Manusia adalah kekayaan utama suatu negara, sehingga tujuan utama pembangunan seharusnya berpusat pada manusia. Banyak negara terutama yang sedang berkembang, menganggap bahwa keberhasilan pembangunan diukur dari peningkatan kesejahteraan manusia dan pengentasan kemiskinan, dengan menitikberatkan pembangunan yang berorientasi pada manusia. Mengingat konteks ini, pembangunan menjadi lebih terfokus pada pembangunan sumber daya manusia dibandingkan hanya sekedar membangun infrastruktur fisik, di mana masyarakat

didorong untuk memperluas peluang hidup mereka menuju kehidupan yang kreatif, bebas, dan bermartabat (Amaluddin et al., 2018). Salah satu metrik utama yang digunakan dalam mengkarakterisasi tingkat kesejahteraan suatu daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tiga aspek mendasar pembangunan manusia yang dinilai dalam IPM yaitu pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup yang layak. Di Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi IPM adalah metrik yang digunakan untuk mengukur seberapa sukses pembangunan yang telah dicapai. Namun, meskipun mengalami pertumbuhan ekonomi, beberapa masalah sosial, seperti ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan pengangguran, tetap menjadi tantangan yang signifikan (BPS, 2022).

Indikator Pembangunan Manusia yakni penanda berarti ukuran pembangunan manusia sesuatu negara. IPM adalah satu penanda berarti pada rasio pembangunan manusia sesuatu negeri yang merupakan *Human Development Index (HDI)* ataupun kerap pula juga disebut Indikator Pembangunan Manusia (IPM). IPM mengukur perkembangan suatu negara, yang memastikan negara itu terbelakang, bertumbuh, ataupun maju. IPM juga mengukur negara berpenghasilan tinggi, negara berpenghasilan menengah ke atas, menengah ke bawah, dan negara miskin atau berpendapatan rendah (Fransimeon, 2023).

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2024), Dalam beberapa tahun terakhir Indeks Pembangunan Manusia Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2024 mencapai 74,20 dengan kenaikan 0,88 persen dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 73,55. Peningkatan ini juga terlihat di sejumlah daerah, termasuk Provinsi Jambi. Menurut Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi mencapai angka 73,43 pada tahun 2024. IPM Provinsi Jambi masih lebih rendah dibanding sejumlah provinsi lain yang terletak di Pulau Sumatera meliputi Aceh, Sumatera utara, Sumatera Barat, Riau, dan kepulauan Riau. Hal ini menandakan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi dapat terbelakang. Berikut adalah data IPM Provinsi Jambi dari tahun 2017 hingga 2024.

Table 1.1 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi Tahun 2017-2024

Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kerinci	70,03	70,59	70,95	71,21	71,45	71,99	72,54	73,11
Merangin	68,30	68,81	69,07	69,19	69,53	69,68	70,81	71,66
Sarolangun	69,03	69,41	69,67	69,86	70,25	70,89	71,29	72,01
Batanghari	68,92	69,33	69,67	69,84	70,11	70,51	71,02	71,67
Muaro Jambi	67,86	68,34	69,01	69,18	69,55	70,18	71,04	71,91
Tanjung Jabung Timur	62,61	63,32	63,92	64,43	64,91	65,77	66,65	67,54
Tanjung Jabung Barat	66,15	67,13	67,54	67,54	68,16	68,79	69,35	69,93
Tebo	68,16	68,67	69,02	69,14	69,35	69,78	70,63	71,32
Bungo	69,04	69,42	69,86	69,92	70,15	70,55	71,06	71,92
Kota Jambi	76,74	77,41	78,26	78,37	79,12	79,58	80,15	81,04
Kota Sungai Penuh	73,75	74,67	75,36	75,42	75,70	76,17	76,65	77,40
Provinsi Jambi	69,99	70,65	71,26	71,27	71,63	72,14	72,77	73,43

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa setiap tahunnya Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi mengalami peningkatan, pada tahun 2024 mencapai 73,43 naik sebesar 0,90 persen dibanding tahun sebelumnya. Kota Jambi memiliki IPM yang tinggi dibanding kabupaten/kota lainnya yaitu mencapai 81,04 di tahun 2024. Kemudian Kota Sungai Penuh dengan IPM 77,40 lalu Kabupaten Kerinci dengan IPM mencapai 73,11. Sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki IPM terendah yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur 67,54, walaupun terendah IPM Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. kemudian Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan IPM sebesar 69,93.

Indeks Pembangunan Manusia memiliki 3 komponen utama, yang pertama yaitu Standar hidup yang layak. UNDP menjadikan indikator Produk Nasional Bruto (GNP) per kapita guna menilai tingkat kelayakan standar hidup, Karena PDRB per kapita mengukur kesejahteraan ekonomi penduduk suatu wilayah (Hasanah, 2021).

Peningkatan PDRB per kapita di suatu daerah seiring dengan tingginya potensi pendapatan yang dapat diperoleh dari daerah tersebut, yang pada gilirannya menghasilkan peningkatan pendapatan masyarakat di area tersebut (BPS, 2023). Dengan demikian, PDRB memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan penduduk

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendapatan per kapita masyarakat akan meningkat seiring dengan kenaikan PDRB, sehingga adanya peningkatan per kapita mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pola konsumsi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup juga dipengaruhi oleh PDRB. Kemampuan untuk membeli barang dan jasa jelas berhubungan langsung dengan IPM (Amrullah, 2022).

Berdasarkan Badan Pusat PDRB per kapita di Provinsi Jambi mengalami peningkatan setiap tahunnya. PDRB per kapita Provinsi Jambi tercatat sebesar Rp38.834 pada tahun 2017, kemudian meningkat 3,06 persen menjadi Rp40.026 pada tahun 2018. Tahun 2019 PDRB per kapita Provinsi Jambi naik 4,46 persen menjadi Rp41.812. PDRB per kapita Provinsi Jambi sedikit meningkat sebesar 0,04 persen menjadi Rp41.926 di tahun 2020. Pada tahun 2022 terjadi kenaikan 3,76 persen dari tahun sebelumnya, sehingga PDRB per kapita Provinsi Jambi mencapai Rp44.515. Terakhir, tahun 2023 PDRB per kapita Provinsi Jambi meningkat 3,35 persen, mencapai Rp46.007. Kabupaten/Kota yang memiliki PDRB per kapita tertinggi yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar Rp102.834 yang mana angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, Sedangkan PDRB per kapita terendah yaitu Kabupaten Kerinci sebesar Rp30.686 tahun 2024

Pembangunan ekonomi suatu negara tidak hanya diukur dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tetapi juga dari kualitas sumber daya manusia yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator komprehensif yang mencakup dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Oleh karena itu, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan IPM menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan, termasuk dalam aspek ketenagakerjaan seperti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (Widodo & Zakiah, 2022)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menunjukkan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Semakin tinggi TPAK, semakin besar potensi produktivitas tenaga kerja dalam perekonomian suatu negara. Partisipasi angkatan kerja yang tinggi mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki peluang yang lebih besar dalam

mendapatkan pekerjaan dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Nabila et al., 2022)

Faktor-faktor yang mempengaruhi TPAK mencakup aspek demografi, pendidikan, dan kebijakan ketenagakerjaan. Faktor demografi mencakup struktur usia penduduk di suatu negara, di mana negara dengan populasi usia produktif yang besar cenderung memiliki TPAK yang lebih tinggi. Sementara itu, tingkat pendidikan juga berperan penting dalam menentukan sejauh mana seseorang dapat berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja secara efektif. Selain faktor internal, kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah juga memainkan peran penting dalam menentukan TPAK. Di negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan banyaknya peluang kerja, TPAK cenderung lebih tinggi. Sebaliknya, dalam kondisi krisis ekonomi, banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan mengalami penurunan partisipasi dalam pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, kebijakan ketenagakerjaan seperti pelatihan keterampilan dan program pemberdayaan tenaga kerja menjadi instrumen penting dalam meningkatkan TPAK (Endang & Saiful, 2024).

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja (Sakernas) 2023, jumlah angkatan kerja di Provinsi Jambi sebanyak 1,83 juta jiwa dan pada tahun yang sama Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Jambi sebesar 67,88 persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tertinggi di tahun 2024 yaitu Kabupaten Kerinci sebesar 77,64 persen dari jumlah angkatan kerja sebanyak 233.135 jiwa, lalu Kabupaten Merangin dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 71,17 persen. Di tahun yang sama Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terendah yaitu Kabupaten Batanghari yaitu sebesar 63,53 persen dari jumlah angkatan kerja sebanyak 144.112 jiwa.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang mencerminkan jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan. TPT yang tinggi menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dan kesempatan kerja yang ada. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam pembangunan ekonomi karena mencerminkan ketidakefisienan dalam penyerapan tenaga kerja. Dalam jangka

panjang, tingginya tingkat pengangguran dapat berdampak negatif terhadap IPM karena keterbatasan pendapatan dapat menghambat akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas (Widodo & Zakiah, 2022).

Berbagai faktor dapat mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka, termasuk pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, dan struktur industri suatu negara. Ketika pertumbuhan ekonomi melambat, banyak perusahaan yang mengurangi perekrutan tenaga kerja atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), yang berdampak pada peningkatan TPT. Di sisi lain, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja dapat menjadi penghalang dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini secara langsung mempengaruhi IPM karena pendidikan yang rendah membatasi peluang tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil dan berpenghasilan layak (Sembiring, 2020).

TPT yang tinggi dapat berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam konteks IPM, kondisi ini dapat memperburuk kualitas hidup masyarakat karena keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan dan rendahnya investasi dalam pendidikan anak-anak dari keluarga pengangguran (Cahyanti, 2021)

Berdasarkan Badan Pusat Statistik 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jambi sebesar 4,45 persen. Angka ini turun 0,05% poin dibandingkan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kabupaten/Kota yang memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi yaitu Kota Jambi sebesar 7,38% pada tahun 2024, lalu Kabupaten Muaro Jambi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,27%. Dan pada tahun yang sama Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka yang paling rendah yaitu sebesar 2,06%, lalu Kabupaten Tebo dengan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,5%.

Selain faktor ekonomi, faktor sosial seperti kemiskinan juga memiliki andil dalam pembangunan manusia. Kemiskinan adalah masalah sosial yang muncul akibat ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, serta kurangnya perhatian terhadap kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan. Kondisi memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan manusia, memperbesar kesenjangan, dan menghambat pencapaian target IPM yang

ditetapkan oleh pemerintah. Dari sudut pandang ekonomi, kemiskinan menghasilkan tenaga kerja yang tingkat pendidikannya rendah dan produktivitas yang minim. Akibatnya, pendapatan dan upah yang diperoleh menjadi terbatas, sehingga seiring dengan perkembangannya akan berpengaruh pada tingkat pembangunan manusia pada suatu daerah (Mirza, 2011).

Berdasarkan Badan Pusat Statistik 2024, jumlah penduduk miskin Provinsi Jambi sebanyak 265.420 jiwa mencapai 7,10%. Pada tahun sebelumnya jumlah penduduk miskin Provinsi Jambi yaitu 280.680 jiwa, hal ini menunjukkan bahwasanya jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi mengalami penurunan. Pada tahun 2024 tercatat Kota Jambi memiliki jumlah penduduk miskin paling banyak dibanding Kabupaten/Kota lain, yaitu sebanyak 47.250 ribu jiwa mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 50.090 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk miskin paling sedikit yaitu Kota Sungai Penuh sebanyak 2.600 jiwa. Tentunya hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik aspek ekonomi, sosial maupun kebijakan pemerintah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti berminat untuk mengkaji penelitian dengan judul “Determinan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi: Analisis Data Panel”

1.2 Rumusan Masalah

Salah satu fokus utama dari upaya pembangunan ekonomi di sebuah negara yaitu pembangunan manusia yang berkelanjutan. Sebuah metode untuk mengevaluasi kualitas hidup masyarakat, Indeks Pembangunan Manusia memperhitungkan faktor-faktor termasuk pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang wajar. PDRB, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan tingkat pengangguran terbuka dan penduduk miskin merupakan beberapa aspek penting yang diduga mempengaruhi IPM guna mencapai pembangunan manusia yang maksimal. PDRB menunjukkan tingkat kesejahteraan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat di suatu wilayah, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi, dan tingkat pengangguran terbuka menggambarkan kondisi ketersediaan lapangan kerja serta efektivitas penyerapan tenaga kerja. Di sisi lain, jumlah penduduk miskin memberikan

gambaran mengenai kondisi sosial dan ekonomi yang dapat menghambat peningkatan kualitas hidup. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh dari keempat faktor tersebut terhadap IPM, sehingga untuk menentukan sejauh mana setiap variabel berkontribusi dalam memajukan pembangunan manusia.

Dengan demikian dibuat rumusan masalah penelitian, antara lain:

1. Bagaimana perkembangan Indeks Pembangunan Manusia, PDRB perkapita, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka dan penduduk miskin di Provinsi Jambi.
2. Bagaimana pengaruh PDRB perkapita, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka dan penduduk miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan Indeks Pembangunan Manusia, PDRB perkapita, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka dan penduduk miskin di Provinsi Jambi tahun 2017-2024.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh PDRB perkapita, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka dan penduduk miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi tahun 2017-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat, di antaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini bertujuan untuk menjadi acuan bagi penelitian berikutnya serta menyediakan data yang dapat digunakan dalam penelitian pengembangan dan kajian literatur di waktu mendatang.

2. Manfaat Praktis

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan oleh pemerintah dalam menyusun kebijakan terkait pembangunan nasional.